

Perubahan Nama Jalan dan Konstruksi Identitas Kota: Sebuah Tinjauan Analitis

Inggit Diah Novitaningrum, Heri Sutanta

Masuk: 30 11 2023 / Diterima: 30 01 2024 / Dipublikasi: 30 06 2024

Abstract *The city as a unit of settlement is the most rapidly changing. As the city grows, one of the elements that often change is the road. Road changes can be both physical and in the name. DKI Jakarta, as the capital of the country, has high dynamics and rapid development. Yogyakarta is a traditional Javanese city full of philosophy and privileges. The change of street names in these two cities is interesting to explore to see urban identity's construction. Through a critical toponym study approach, utilization of GIS, and temporal data, this research aims to explore the development of urban identity through street name changes. Urban street name changes show how ideological, literary, scientific, and historical elements enter the urban space. The objectives of this study are to describe the pattern of urban street name changes and to explain the factors that influence urban street name changes. Data on street name changes were collected from various sources, namely historical maps, archival documents, history books, and interviews. Interviews were conducted to understand the context of street name changes in the current condition. Based on the results of the analysis, the pattern of street name changes follows the characteristics highlighted in a city. Major turning point events such as independence trigger the most dominant street name changes. In addition, socio-cultural factors in the community are the values embraced by the community to shape the city's identity.*

Keywords: *Toponymy; Street Name Changes; Identity; Urban*

Abstrak Kota sebagai satuan pemukiman yang paling cepat mengalami perubahan. Seiring perkembangan kota, salah satu unsur yang sering mengalami perubahan yaitu jalan. Perubahan jalan dapat berupa fisik maupun namanya. DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki dinamika yang tinggi dan perkembangan yang pesat. Kota Yogyakarta merupakan kota tradisional Jawa penuh dengan filosofi dan keistimewaan. Perubahan nama jalan pada kedua kota ini merupakan hal yang menarik untuk dieksplorasi guna melihat konstruksi identitas kota. Melalui pendekatan studi toponim kritis, pemanfaatan SIG, dan data spasial temporal, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan identitas kota melalui perubahan nama jalan. Perubahan nama jalan perkotaan menunjukkan bagaimana elemen ideologis, sastra, ilmiah, dan sejarah masuk ke dalam ruang kota. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pola perubahan nama jalan perkotaan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nama jalan perkotaan. Data mengenai perubahan nama jalan dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu peta sejarah, dokumen arsip, buku sejarah, dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memahami konteks perubahan nama jalan pada kondisi saat ini. Berdasarkan hasil analisis, pola perubahan nama jalan sesuai dengan karakteristik yang ditonjolkan pada suatu kota. Peristiwa titik balik besar seperti kemerdekaan memicu perubahan nama jalan yang paling dominan. Selain itu faktor sosial budaya pada masyarakat yaitu nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai upaya untuk membentuk identitas kota.

Kata kunci: Toponimi; Perubahan Nama Jalan; Identitas; Kota

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



1. Pendahuluan

Ruang senantiasa berkembang; melalui konstruksi yang berkelanjutan, terbuka, terus berubah dan beradaptasi dengan berbagai pengaruh dan perubahan (Massey, 2005). Ruang mencakup beragam elemen seperti jalan, taman, gedung, dan infrastruktur lainnya yang bersama-sama membentuk karakteristik dan fungsi suatu daerah. Jalan atau dalam istilah lain “jalur” diakui oleh (Lynch, 1960) sebagai elemen terpenting yang membentuk citra sebuah kota dan fitur yang paling menonjol dan berkesan.

Pada era urbanisasi dan perkembangan kota yang pesat, perubahan nama jalan telah menjadi bagian integral dari transformasi kawasan perkotaan. Perubahan ini sering kali melibatkan pertimbangan historis, budaya, dan identitas kota. Di Indonesia, khususnya di Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta, perubahan nama jalan bukanlah fenomena baru. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pergeseran tuntutan politik, banyak nama jalan yang telah mengalami transformasi sepanjang waktu.

Kota Jakarta, sebagai ibu kota negara, dan Kota Yogyakarta, sebagai pusat kebudayaan dan sejarah, memegang peranan khusus dalam membentuk citra bangsa dan memelihara warisan budaya. Perubahan nama jalan di kedua kota ini menandai upaya untuk mengadaptasi dan merefleksikan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi.

Nama jalan tidak hanya sebagai pengenal dan pembeda geografis, tetapi juga menjadi penyimpan ingatan peristiwa budaya, orang, dan tempat dalam pemikiran penduduk perkotaan baik secara sadar maupun tidak sadar. Nama jalan memiliki pengaruh praktis langsung bagi masyarakat sebagai penanda spasial dan sejarah, sebuah kondisi yang berbeda dibandingkan dengan monumen sejarah (Gill, 2005). Nama jalan memiliki potensi, terletak pada kemampuannya untuk menjadikan sejarah sebagai elemen nyata yang terus-menerus dikonstruksi, dialami, dan dirasakan setiap hari (Azaryahu, 1996).

Penamaan jalan pada dasarnya adalah praktik toponimi dalam menempati ruang, menciptakan kenangan, menegaskan identitas, dan menetapkan batas (Alderman, 2008) serta bagian dari konstruksi arsitektur kota dari pembentukan identitas (jati diri) yang berubah seiring berjalannya waktu di sebuah kota, serta mengakar dari struktur publik, ekonomi, budaya masyarakat dan kota (Bancilhon et al., 2021). Dalam pandangan (Tent, 2015), semua nama tempat mempunyai sejarah, dan nama tersebut mungkin diberikan oleh seseorang pada waktu tertentu karena alasan tertentu. Selain sebagai penanda lokasi yang meningkatkan efisiensi kehidupan di kota, pemilihan nama untuk suatu ruas jalan didasarkan pada pertimbangan khusus, seperti yang ditegaskan oleh (Sutanta et al., 2022; Suwarno & Salamun, 1990).

Penelitian mengenai perubahan nama jalan belum banyak dilakukan di wilayah Asia, khususnya di Indonesia (Rusu, 2021b). Mayoritas penelitian

Inggit Diah Novitaningrum, Heri Sutanta
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

inggit.diah@big.go.id

sebelumnya mengenai nama jalan berfokus pada aspek asal usul pemberian nama jalan saja (Catur Liskah Kartika, 2020; Hestiyana, 2022; Prihadi, P. & Listiyorini, 2020; Rahmadian, 2022; Simatupang & Lubis, 2023). Penelitian mengenai perubahan nama jalan sudah dilakukan oleh (Erikha, 2021) menggunakan metode toponim kritis untuk mengetahui bagaimana nama jalan mendapatkan maknanya, baik secara intertekstual maupun secara relasional. Namun studi tersebut belum menggunakan data kurun waktu.

Analisis *research gap* menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang dilakukan mengenai perubahan nama jalan. Penelitian ini bertujuan mengisi celah keilmuan dengan melakukan penelitian terhadap perubahan nama jalan pada DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta dengan studi toponim kritis. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu nama jalan dianalisis berdasarkan waktu perubahannya dan divisualisasikan secara spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografi (SIG). Fokus akan diberikan pada perubahan nama jalan dalam beberapa dekade terakhir, mengidentifikasi alasan di balik perubahan tersebut, dan menganalisis perubahannya terhadap identitas kota, serta aspek budaya dan sejarah.

Pengungkapan historis dan makna budaya dari perubahan-perubahan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi kedua kota ini dan sekaligus mencerminkan perubahan lebih luas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan

menganalisis perubahan nama jalan sebagai manifestasi dari dinamika perkotaan dan perubahan identitas di kedua kota. Melalui pemahaman lebih mendalam terhadap proses perubahan nama jalan, dapat meresapi esensi dan signifikansi perjalanan sejarah serta memahami bagaimana identitas kota terus berubah seiring waktu. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi terhadap pemahaman tentang pola perubahan nama jalan di perkotaan dan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut.

2. Metode

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dan DKI Jakarta (Gambar 1). DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi dengan luas wilayah 662,33 km². Kota-kota di Jakarta meliputi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber: Peneliti, 2023)

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode kuantitatif dan kualitatif (Creswell &

Creswell, 2018). Studi ini menggunakan metodologi campuran bertahap, khususnya strategi eksplorasi sekuensial, yang memerlukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif (Rusu, 2019), diikuti oleh akuisisi dan analisis kualitatif mengenai faktor yang mempengaruhi perubahannya. Pada penelitian ini sebagian besar mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mencapai tujuannya karena cenderung ke konteks. Alasannya adalah untuk memahami fenomena secara mendalam berfokus pada faktor sosio-spasial yang menjelaskan situasi tertentu untuk memahami nuansa lokal.

Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini secara umum terbagi menjadi empat langkah utama: persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis. Alur kerja penelitian ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penelitian (Sumber: Peneliti, 2023)

Penjelasan detail dari alur penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, survei lapangan dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Secara khusus wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah dan pakar dari Kota Yogyakarta dan DKI Jakarta. Survei lapangan ke lokasi terpilih untuk memverifikasi nama jalan, mengamati nama jalan dan papan tanda yang ada, dilengkapi dengan foto-foto nama jalan. Pengumpulan data lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Pendekatan kualitatif melibatkan analisis berbagai dokumen atau sumber tentang penamaan jalan. Data spasial berupa data administrasi kabupaten/kota dan data jaringan jalan. Data perubahan nama jalan diperoleh dari pemerintah daerah berupa surat keputusan, peta dan catatan administratif, studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai tulisan pada buku, laporan penelitian, artikel berita, dan sumber *online* dilakukan untuk mengklarifikasi perubahan nama dan kapan terjadinya.

Validitas atau keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi (Sugiyono, 2018). Metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik, di mana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber baik dari pengamatan langsung, dokumentasi, dan narasumber dapat saling mengkonfirmasi keabsahannya

Tabel 1. Pengumpulan Data

No	Data	Teknik	Sumber data	
			Primer	Sekunder
1	Peta administrasi Kabupaten/Kota	Dokumentasi	-	Badan Informasi Geospasial
2	Peta jaringan jalan DKI Jakarta skala 1:10.000	Dokumentasi	-	Diunduh dari https://jakartasatu.jakarta.go.id
3	Peta jaringan jalan Kota Yogyakarta skala 1:25.000	Dokumentasi	-	Pemerintah Kota Yogyakarta
4	Data perubahan nama jalan	Studi literatur dan dokumentasi	-	Pemerintah daerah, internet, buku, arsip peta (diunduh dari https://trove.nla.gov.au/)
5	Faktor perubahan nama jalan	Wawancara	Transkrip Wawancara	-
6	Data foto papan nama jalan/toko	Survei Lapangan	Dokumentasi lapangan	-

Sumber: Peneliti, 2023

Pengolahan data: Data spasial diolah dengan perangkat lunak ArcGIS dan divisualisasikan berbasis SIG untuk memetakan perubahan nama jalan (Buchstaller et al., 2023; Rusu, 2021a). Untuk menentukan apakah suatu jalan diganti namanya, dilakukan pencatatan

perubahan nama sehubungan dengan periode sejarah sebelumnya. Informasi perubahan nama jalan ditambahkan pada atribut data spasial dengan memberikan pengkodean tertentu. Prosedur pengkodean dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Pengkodean

Nama jalan sekarang	Nama jalan sebelum	Perubahan nama	Jumlah Perubahan	Periode
Jl. Pangurakan	Jl. Pangurakan, <i>Kadaster Straat</i> , Jl. Pangurakan, Jl. Trikora	1	4	2013
Jl. Margo utomo	Jl. Margatama, <i>Toegoescheweg</i> , Jl. Tugu Kidul, Jl. P. Mangkubumi	1	4	2013
Jl. Sidobali	Jl. Balirejo	1	1	1988
Jl. Gamelan	-	0	0	-

Sumber: Peneliti, 2023

2) Analisis data

Analisis perubahan nama jalan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan terhadap pola perubahan nama jalan dan faktor perubahan nama jalan. Analisis pola diidentifikasi berdasarkan periode perubahan, nama yang digunakan dan distribusi spasialnya. Analisis faktor

perubahan nama jalan dilakukan dengan meneliti data historis, geografis, kebudayaan, administratif serta elaborasi dengan data hasil wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

Pola Perubahan Nama Jalan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan teroganisair pada unit-unit informasi, pola perubahan nama jalan

dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagaimana diuraikan berikut.

1) Periode perubahan nama jalan

Hasil pengolahan data perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta dan DKI Jakarta dapat dilihat pada

Tabel 3. Tabel 3 menyajikan jumlah perubahan nama di DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta dalam beberapa periode, yaitu tahun 1950 hingga tahun 2022. Total keseluruhan menunjukkan bahwa DKI Jakarta mengalami 217 perubahan nama jalan, sementara Kota Yogyakarta mencatat 74 perubahan. Dalam kurun waktu tertentu, terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah perubahan nama jalan di kedua wilayah tersebut. Periode ini membuktikan adanya evolusi nama jalan baik di DKI Jakarta maupun di Kota Yogyakarta.

Pada tahun 1950, DKI Jakarta mengalami puncak perubahan nama jalan dengan jumlah mencapai 166, sedangkan Kota Yogyakarta hanya mengalami dua perubahan. Perubahan-perubahan tersebut tidak terjadi serentak, tetapi tersebar dalam beberapa tahun, dengan lonjakan signifikan terlihat pada tahun-tahun tertentu seperti 1958 dan 1966 di Kota Yogyakarta.

Perjalanan perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta mencerminkan transformasi dalam identitas kota seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka, menandai berakhirnya kekuasaan kolonialisme. Upaya pemerintah untuk mengganti nama jalan di Kota Yogyakarta dimulai pada tahun 1950-an. Penggantian nama jalan di Kota Yogyakarta tidak dapat dilakukan pada masa revolusi akibat perang kemerdekaan melawan Belanda

yang menarik perhatian seluruh penduduk Indonesia. Di Kota Yogyakarta perubahan nama jalan terjadi antara tahun 1955 dan 1965 dibandingkan antara tahun 1965 hingga 2023. Tahun 1947-1949 merupakan masa perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan pada masa itu Kota Yogyakarta menjadi ibukota sementara.

Tabel 3. Jumlah Perubahan nama jalan di DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta

Tahun Perubahan	DKI Jakarta	Kota Yogyakarta
1950	166	-
1955	-	2
1956	-	5
1958	-	21
1960	5	-
1966	-	27
1967	-	3
1968	-	1
1970	-	1
1971	-	3
1978	-	1
1981	-	1
1982	-	1
1987	-	1
1988	-	2
1991	-	1
1994	19	-
2013	1	3
2014	2	-
2016	-	1
2021	2	-
2022	22	-
Total	217	74

Di DKI Jakarta, perubahan nama jalan didokumentasikan berdasarkan referensi peta dan dokumen lainnya, sehingga perubahan nama jalan dilakukan secara bertahap. Pada dekade pertama kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1960-an, perubahan nama jalan semakin sering terjadi. Sejak

tahun 1970-an hingga tahun 2000-an, perubahan nama jalan menurun secara signifikan baik di DKI Jakarta maupun Kota Yogyakarta. Ini mencerminkan periode konsolidasi identitas kota yang lebih matang. Pada awal periode setelah Indonesia merdeka, terlihat bahwa terdapat sejumlah perubahan nama jalan yang cukup signifikan. Ini mengindikasikan adanya pembentukan identitas baru setelah masa kolonialisme. Momentum kemerdekaan secara ideologis merupakan sebuah titik balik.

Pada tahun 1994 DKI Jakarta kembali melakukan 19 perubahan nama jalan pada Jalan Arteri/Lingkar Luar DKI Jakarta. Perubahan nama jalan sejak tahun 1994 hingga tahun 2021 tidak banyak. Perubahan nama jalan di DKI Jakarta dilakukan kembali pada tahun 2022 sebanyak 22 nama jalan, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.565 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung, dan Zona dengan nama Tokoh Betawi dan Jakarta. Pada tahun-tahun terakhir, seperti 2022, DKI Jakarta mencatat 22 perubahan sementara Kota Yogyakarta tidak memiliki perubahan nama jalan.

Hasil analisis dari kedua kota menunjukkan bahwa berdasarkan periode perubahan nama jalan menemukan fakta bahwa semangat perubahan nama jalan semakin mengecil seiring perkembangan waktu (Buchstaller et al., 2023). Analisis kuantitatif dapat memberikan dukungan terhadap pengamatan studi kualitatif mengenai perubahan nama jalan dalam sebuah teks dalam ruang perkotaan (Rusu, 2021a).

2) Nama yang digunakan

Perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta dan DKI Jakarta dapat dianalisis berdasarkan nama-nama yang digunakan selama beberapa periode tertentu. Peninjauan terhadap data menunjukkan bahwa perubahan nama jalan tidak hanya terbatas pada jumlahnya, tetapi juga mencerminkan tren penggunaan nama tertentu dalam konteks sejarah dan budaya masing-masing wilayah. Pada masa pendudukan Belanda, terdapat nama jalan di Kota Yogyakarta yang menggunakan nama jalan dalam Bahasa Belanda. Berdasarkan Peta Belanda tahun 1925 *Jogjakarta en Omstreken* (Topografische Inrichting, 1925) ditemukan beberapa nama-nama Belanda. Beberapa nama jalan seperti *Boulevard Jonquire*, *Tjode weg*, *Residentie laan*. Sejalan dengan hal ini maka informan 1 menyebutkan bahwa:

“Dulu waktu tahun 1930an sampai 1940an masih menggunakan bahasa Belanda. Jadi Tugu ke Barat namanya Tugu kulon *weg*, Tugu kulon itu maksudnya tugu yang ke barat dan *weg* artinya adalah jalan perekonomian. Kalau yang ke timur Tugu wetan *weg*. Yang ke utara, jalan Jetis. Dalam peta lama, Peta Belanda, atau peta AMS nama jalannya *Jetis weg*. Karena denat dengan Pasar Kranggan. Beda dengan kawasan Malioboro. Memang sekarang terkenal dengan kawasan perekonomian tapi dulu kawasan Malioboro itu *straat*, *straat* itu area pemerintahan, karena di sana ada kantor gedung DPRD yang digunakan perkumpulan oleh orang Belanda, kemudian ada gedung Agung, Istana Kepresidenan, yang dulu merupakan kantor residen Belanda. Nanti beda lagi dengan area Kotabaru. Di Kota Baru mayoritas menggunakan *laan*. Karena mayoritas pemukiman. Dulu jaman Belanda nama jalannya sesuai dengan ciri-ciri regionnya atau areanya digunakan untuk apa.” (Informan 1, 2023)

Tabel 4. Perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta

Nama sebelum	Nama sekarang	Penjelasan perubahan nama
Jl. Danuredjan	Jl. Parangtritis (1956)	Danurejan: nama kampung Danurejan, yang merupakan tempat tinggal abdi dalem/Tumenggung Danurejan Parangtritis: karena jalan tersebut menuju ke Parangtritis
<i>Tjodeweg</i>	Jl. Achmad Jazuli (1958)	Tjode: di dekatnya terdapat Sungai Code Achmad Jazuli: salah seorang pejuang yang gugur dalam pertempuran Kotabaru
<i>Boulevard Jonquire</i> , Jl. Margokridonggo	Jl. Abu Bakar Ali (1958)	<i>Boulevard Jonquire</i> : Diambil dari nama Petrus Wilhelm Jonquière selaku residen Yogyakarta Margokridonggo: karena dari arah barat ke timur akan sampai ke tempat olahraga (skrg Stadion Kridosono) Abu Bakar Ali: nama pahlawan revolusi
Jl. Lempuyangwangi, Jl. Stasiun	Jl. Hayam Wuruk (1966)	Lempuyangwangi: nama tempat lempuyangwangi Stasiun: jalan menuju ke stasiun Hayam Wuruk: mengenang kembali Raja Hayam Wuruk, pada saat masih menjadi raja di Majapahit mencapai keemasan
Jl. Sidikan	Jl. Perintis Kemerdekaan (1978)	Sidikan: dari tempat itu melihat Perintis kemerdekaan: Untuk mengenang jasa-jasa para perintis kemerdekaan terhadap bangsa dan tanah air Indonesia.
Jl. Pengok	Jl. Koesbini (1991)	Pengok: Suara pluit uap yang bunyinya "Ngook" pada jam 07.00 dan terakhir jam 14.00 mengatur jam masuk dan pulang para tenaga kasar di perusahaan KA Pemerintah Belanda Koesbini: Tokoh komponis Nasional yang berjasa di bidang seni musik
<i>Residentie laan</i> , Jl. Ahmad Yani	Jl. Margamulya (2013)	<i>Residentie laan</i> : kediaman residen Belanda Ahmad Yani: Pahlawan Nasional Margamulya: keyakinan filosofis Yogyakarta
Toegoe kidul weg, Jl. Tugu Kidul, Jl. Pangeran Mangkubumi (1956), Jl. AM. Sangaji (2013)	Jl. P. Mangkubumi (2016)	Tugu kidul: Terdapat bangunan berupa tugu di perempatan jalan, jalan dari tugu ke arah selatan diberi nama tugu kidul A.M. Sangaji: Pahlawan Nasional P. Mangkubumi: Tokoh pendiri Keraton

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023

Beberapa contoh perubahan nama jalan dan penjelasan perubahan namanya dapat dilihat pada Tabel 4. Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nama jalan di Kota Yogyakarta sebelum ada perubahan terdiri dari nama Belanda, nama yang berhubungan dengan kraton, berkaitan dengan alam, dan aspek geografis.

Perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta setelah Kemerdekaan didominasi penggunaan nama-nama pahlawan nasional dan peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Hal tersebut bertujuan untuk mengenang jasa para Pahlawan yang berjuang pada masa perjuangan kemerdekaan. Nama Pahlawan Nasional yang digunakan yaitu

pahlawan nasional yang gugur dalam peristiwa Pertempuran Kota Baru sebanyak 21 nama digunakan sebagai nama jalan (Gambar 4). Nama jalan seperti Perintis Kemerdekaan, Jl. Veteran, dan Bhayangkara digunakan untuk mengingat perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia melawan penjajah.

Penggunaan nama pembentuk sejarah seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan P. Mangkubumi digunakan untuk menghormati tokoh yang berjasa dalam pembentukan Kota Yogyakarta, dari Kerajaan hingga terbentuknya Keraton Yogyakarta. Nama Jalan Parangtritis, Jalan Magelang, Jalan Imogiri, dan Jalan Bantul menunjuk pada arah jalan dari Kota Yogyakarta menuju ke wilayah yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Nama Margamulya, Margautama, Pangurakan yang meunjukkan pada nilai filosofis Kota Yogyakarta.

Nama-nama tempat yang digunakan di berbagai wilayah di wilayah DKI Jakarta mencerminkan karakteristik desa-desa tersebut, seperti Sawah Besar, Rawa Belong, dan Pulo Gadung. Ada pula nama yang terkait dengan flora, seperti kawasan Menteng, Bintaro Kelapa Gading, dan Kebon Jeruk. (Gunawan et al., 2010). Sejak zaman Batavia, jalan di wilayah DKI Jakarta sudah banyak yang memiliki nama. (Ruchiat, 2018) nama tempat atau jalan pada masa kolonial banyak yang berbahasa Belanda.

“Nama-nama kawasan atau jalan yang sudah dinamai oleh masyarakat sekitar akan dipertahankan oleh mereka. Sedangkan nama kawasan atau jalan yang tidak memiliki nama, akan diberi nama oleh mereka. Jalan yang sudah ada namanya ditambahkan

dengan kosakata bahasa Belanda, seperti gang (jalan kecil), *weg* (jalan), *laan* (jalan yang di kanan kirinya terdapat pohon-pohon), *straat* (jalan yang di kanan kirinya terdapat toko-toko dan rumah-rumah), dan *boulevard* (jalan besar di antara rumah-rumah mewah atau kawasan elite)” (Ruchiat, 2018).

Berdasarkan peta *Plan of Batavia* tahun 1920-1929 (Dutch East Indies. Officieel Toeristenbureau voor Nederlands-Indië, 1929) ditemukan banyak nama jalan yang menggunakan nama Belanda. Hampir semua jalan dan tempat di Menteng diberi nama oleh Belanda setelah pulau, gunung, kota, dan sungai di Indonesia. Pada masa kolonial, ruas jalan di DKI Jakarta dibagi menjadi beberapa kategori. Jalan raya utama disebut *boulevard*. Misalnya *Van Heutsz Boulevard* yang kini menjadi Jalan Cut Meutia merupakan salah satu jalan elit di kawasan Menteng. Jalan raya kelas satu di pusat kota disebut *straat* atau *laan*. *Weg* untuk menyebut jalan yang lebih kecil dari *straat* dan biasanya berada di pinggiran kota. Beberapa nama jalan yang diubah di DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 5.

Sama halnya dengan di Kota Yogyakarta, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak perubahan nama jalan di DKI Jakarta yang mengandung nama Belanda menjadi nama baru sesuai dengan identitas nama Indonesia (Dittop Indonesia, 1960). Setelah Indonesia merdeka, banyak nama-nama jalan yang diberi nama dengan nama tokoh dan pahlawan, seperti HOS Cokro Aminoto, Cut Meutia, MH. Thamrin dan lain-lain. Perubahan nama jalan dari beberapa periode waktu terlihat bahwa perubahan nama jalan yang digunakan didominasi oleh nama tokoh. Perubahan

nama jalan menggunakan nama tokoh dan mengabadikan peran tokoh merupakan upaya untuk menghormati tersebut.

Tabel 5. Perubahan nama jalan di DKI Jakarta

Nama sebelum	Nama sekarang	Penjelasan perubahan nama
<i>Van Heutsz Boulevard</i>	Jl. Cut Meutia (1950)	Van Heutsz: nama Jenderal Hindia Belanda, J.B. van Heutz yang berhasil menaklukkan Aceh Cut Meutia: Pahlawan Nasional, kelahiran Aceh yang berjuang melawan Belanda
Noordwijk, Jl. Nusantara	Jl. H. Juanda (1950)	Noordwijk: sebuah <i>gemeente</i> Belanda Nusantara: tidak ditemukan keterangan Ir H. Juanda merupakan nama salah satu pahlawan revolusi Indonesia, Djoeanda Kartawidjaja. Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I
<i>Bacherachtsgracht</i>	Jl. Pangeran Tubagus Angke (1950)	<i>gracht</i> artinya kanal, jalan tersebut dibangun oleh pengguna HGU Jacob Bacheracht Tubagus Angke: Penguasa Jakarta dan sekitarnya (1552-1601)
Jl. Sawah Besar	Jl. Sukarjo Wiryopranoto (1950)	Sawah Besar: Dahulu merupakan persawahan yang besar dan luas Sukarjo Wiryopranoto: nama tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai duta besar RI di Vatikan, Duta Besar Luar Biasa untuk Republik Rakyat Cina.
<i>Java Weg</i>	Jl. HOS Cokro Aminoto (1950)	Java: nama salah satu pulau di Indonesia yaitu Jawa HOS Cokro Aminoto: Pahlawan Nasional yang terkenal sebagai ketua Sarekat Islam
Jl. Prapatan	Jl. Prajurit KKO Usman-Harun (2013)	Prapatan: persimpangan jalan Usman dan Harun adalah anggota Korps Komando Operasi (KKO-sekarang Marinir)
Jl. Sungai Kendal	Jl. Sekda Saefullah (2021)	Sungai Kendal: Di wilayah tersebut terdapat Sungai Kendal Sekda Saefullah: Tokoh intelektual asal Betawi
Jl. Rawa Buaya	Jl. Guru Ma'mun (2022)	Rawa buaya: daerah ini merupakan kawasan rawa-rawa yang berair. Ketika musim hujan sering terendam banjir dan menurut cerita pernah terdapat buaya hidup. Guru Ma'mun: Tokoh intelektual dan ulama Betawi yang terkenal di Rawa Buaya
Jl. Warung Buncit Raya	Jl. Hj. Tutty Alawiyah (2022)	Warung Buncit: warung paling belakang, berasal dari nama salah satu pemilik warung keturunan Tionhoa bernama Bun Tjit. Hj. Tutty Alawiyah: seorang mantan Menteri pemberdayaan perempuan, akademisi/dosen, dan ulama wanita

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023

Penggantian nama jalan tersebut menandai berakhirnya secara simbolis kekuasaan kolonial dan dimulainya kebebasan berekspresi di negara tersebut dengan memperhatikan elemen tata ruang dan teks kota.

Perubahan nama kolonial merupakan suatu upaya untuk membangun bangsa, menanamkan rasa nasionalisme pada warga negara, dan penghapusan memori Belanda dari teks kota. Perubahan nama jalan tersebut

menandai berakhirnya secara simbolis kekuasaan bangsa kolonial dan ditandai awal dari kebebasan berekspresi suatu negara, dengan melihat elemen spasial dan teks kotanya.

Pada tahun-tahun terkini, DKI Jakarta mencatat jumlah perubahan nama jalan cukup banyak dilakukan pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.565 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung, dan Zona dengan nama Tokoh Betawi dan Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif untuk merespons

perkembangan kota yang dinamis atau perubahan citra yang diinginkan. Sebaliknya, Kota Yogyakarta pada tahun yang sama tidak mengalami perubahan nama jalan, hal ini mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai tradisional dan stabilitas budaya yang dijunjung tinggi. Pada tahun 2013 dan 2016 di Kota Yogyakarta telah terlebih dahulu melakukan perubahan nama jalan dengan tujuan mengembalikan nilai filosofis kota Yogyakarta pada jalan-jalan sepanjang sumbu filosofis Yogyakarta.



Gambar 3. Distribusi spasial perubahan nama jalan: a) Kota Yogyakarta; b) DKI Jakarta (Sumber: hasil olah data, 2023)

Penafsiran perubahan nama jalan berdasarkan nama yang digunakan menunjukkan kompleksitas identitas lokal dan nasional, seiring dengan evolusi masyarakat dan pemerintahan di kedua wilayah penelitian. Perubahan nama jalan di kedua kota tersebut merupakan cerminan dari transformasi yang lebih besar dalam sejarah dan dinamika sosial yang terus berkembang di masing-masing kota. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan nama

jalan sebagai medium untuk menyebarkan wacana nasional di ruang kota masih berlangsung hingga saat ini, sebagaimana terjadi di masa lalu (Dalgıç, E. N. & Yildirim, 2023).

3) Ditribusi spasial perubahan nama jalan

Hasil visualisasi secara spasial distribusi perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta dan DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3a menyajikan lokasi jalan-jalan di Kota

Yogyakarta yang diganti namanya mulai tahun 1925. Sedangkan Gambar 3b menunjukkan lokasi jalan-jalan di DKI Jakarta yang diganti namanya.

Gambar 3a terdapat beberapa pola menarik yang dapat ditemukan dalam hasil analisis ini. Apabila dilihat secara spasial pola perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta menunjukkan banyaknya perubahan di arah utara Kraton Yogyakarta. Hal ini didukung dengan informasi sejarah berdasarkan mobilitas geografisnya, pembangunan Kota Yogyakarta bersamaan dengan istana memekarkan diri ke arah utara (Goenawan, R. & Harnoko, 1993).

Pola perubahan nama jalan yang mencolok yaitu adanya konsentrasi perubahan nama jalan pada ruas jalan sepanjang sumbu filosofi dan mengelompok di daerah Kota Baru. Kotabaru sebelumnya dikenal sebagai *Niuwe Wijk* dan terletak di sebelah timur Sungai Code. Untuk memperluas lahan tersebut, Residen Canne mengusulkan permohonan kepada Sri Sultan agar menyiapkan area khusus bagi warga Eropa di sebelah timur Sungai Code (Anonim, 2017). Pada awal abad ke-20 orang-orang Eropa membuka daerah pemukiman baru di bagian utara kota dan kampung ini disebut Kotabaru (Goenawan, R. & Harnoko, 1993). Oleh karena itu ditemukan banyak nama Belanda di area Kotabaru.



(a)



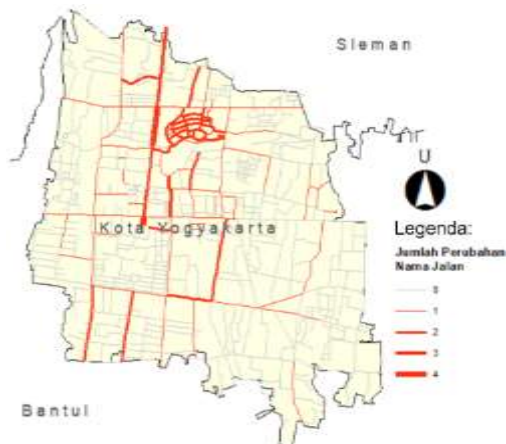
(b)

Gambar 4. Jalan di Kotabaru, Kota Yogyakarta a) Tahun 1925 (Sumber: (Topografische Inrichting, 1925); b) Tahun 2023 (Sumber: hasil olah data, 2023)

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, nama-nama jalan di Kotabaru sepenuhnya menggunakan nama-nama gunung dan sungai (Rahmadian, 2022). Pada wilayah ini perubahan nama jalan cukup banyak terjadi pada tahun 1958. Perubahan tersebut berdasarkan Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1958 sebanyak 21 jalan dirubah menjadi nama pahlawan revolusi (Gambar 4).

Pemukiman di Kotabaru di sisi timur ditetapkan menjadi situs cagar budaya oleh pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 63/Kep/2023 Tentang Penetapan Lokasi Kotabaru Timur sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat

Provinsi. Lokasi Kotabaru Timur menjadi tempat Pertempuran Kota Baru pada tanggal 6-7 Oktober 1945 yang menandai menyerahnya pemerintahan pendudukan militer Jepang di Yogyakarta. Pertempuran ini menjadi peristiwa pertama yang mengawali periode perang kemerdekaan selama beberapa tahun kemudian.



Gambar 5. Lapisan Perubahan Nama Jalan di Kota Yogyakarta (Sumber: hasil olah data, 2023)

Analisis perubahan nama jalan berdasarkan jumlah perubahannya di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 6. Berdasarkan jumlah perubahan nama jalannya, beberapa nama jalan di Kota Yogyakarta terdapat beberapa perubahannya hingga 4 kali yaitu Jalan Pangurakan dan Jalan Margo Utomo. Kemudian diikuti oleh Jalan Margo Mulyo dan Jl. Mayor Suryotomo yang berubah sebanyak 3 kali. Salah satu alasan banyaknya perubahan ini yaitu usia jalan yang lebih tua yang terletak di pusat sejarah. Jalan di sumbu filosofis tersebut diubah kembali menjadi nama aslinya karena memiliki nilai historis. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nama jalan di Kota Yogyakarta erat kaitannya dengan aspek budaya masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu perubahan nama jalan tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya melestarikan warisan budaya.

Tabel 6. Segmen Jalan yang Mengalami Perubahan Nama Jalan Terbanyak di Kota Yogyakarta

No	Nama 1	Nama 2	Nama 3	Nama 4	Nama 5
1	Jl. Pangurakan	<i>Kadaster Straat</i>	Jl. Pangurakan	Jl. Trikora	Jl. Pangurakan
2	Jl. Margatama	<i>Toegoescheweg</i>	Jl. Tugu Kidul	Jl. P. Mangkubumi	Jl. Margo Utomo
3	Jl. Menduran Lor (1925)	Jl. Loji Kecil Wetan dan Jl Ngebraman (1925)	Jl. Menduran	Jl. Mayor Suryotomo	
4	<i>Residentieiaan</i> (1925)	Jl. Margamulya	Jl. Ahmad Yani (1965)	Jl. Margo Mulyo	

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder, 2023

Gambar 3b pola yang menonjol yaitu pergantian nama jalan dilakukan hampir secara eksklusif terkonsentrasi di pusat kota. Berdasarkan informasi sejarah bahwa pusat perkembangan Jakarta berada di Jakarta Pusat khususnya di sekitar Tugu Monas. Tugu

Monas dibangun sebagai bagian dari pembangunan pusat pemerintahan Hindia Belanda (Gunawan et al., 2010). Pengembangan pusat pemerintahan sekaligus pemindahan pusat pemerintahan dari Kotalama ke *Weltevreden* dimaksudkan supaya

wilayah Batavia menjadi lebih luas. Pada masa Daendels, wilayah Gambir dikembangkan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda dengan nama *Weltevreden* yang artinya tempat yang paling ideal untuk lokasi pemukiman. Wilayah tersebut berkembang dan memiliki keteraturan nama-nama jalan.

Pola awal yang terlihat pada perubahan nama jalan tampaknya terdapat di jalan-jalan yang peling dekat dengan Tugu Monas di area Jakarta Pusat. Pola perubahan yang mengelompok di Jakarta Pusat dikarenakan banyak nama jalan yang menggunakan nama Belanda, sama halnya dengan di Kota Yogyakarta, pemerintah berupaya untuk menghilangkan nama-nama yang mengandung kolonialisme menjadi nama-nama sesuai identitas nasional.

Setelah tahun 1960-an jumlah perubahan nama jalan mulai berkurang dan terjadi secara sporadis. Seiring berjalannya waktu tidak ada pola spasial yang diikuti dalam perubahan namanya. Berkaitan dengan hal ini informan 2 lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:

“Dinas Binamarga mengidentifikasi jalan mana yang panjang dan memiliki nama yang sama atau memiliki banyak persimpangan dan dibelah oleh Tol. Atau yang kedua adalah permintaan dari masyarakat. Setelah mengetahui tokoh-tokoh tersebut, juga diidentifikasi pernah tinggal di mana, lahir di mana dan berkiprah di mana. Hal tersebut akan didekatkan dengan segmen yang terdekat.” (Informan 2, 2023).

Berdasarkan penjelasan dari informan 2 tersebut, beberapa hal yang digunakan dalam mempertimbangkan perubahan nama jalan yaitu usulan dari

masyarakat, jalan-jalan yang panjang, serta disesuaikan dengan lokasi kelahiran, tinggal atau kiprah tokoh tersebut.

Pola spasial perubahan nama jalan menunjukkan identitas kota yang telah terbentuk dalam ruang kota. Perkembangan DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta yang lebih luas dalam ingatan, perjuangan memori, dan identitas dapat digali lebih mendalam melalui dimensi spasial perubahan nama jalan. Pemanfaatan dimensi spasial dalam perubahan nama jalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterkaitan triadik antara 'di mana', 'siapa', dan 'apa'. Hal tersebut dapat terungkap melalui seleksi yang disengaja terhadap peristiwa, tokoh sejarah, serta lokasi perubahan nama jalan dengan merincikan versi sejarah tertentu di lokasi-lokasi kunci. (Drozdzewski, 2014).

Faktor Perubahan Nama Jalan

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui beberapa faktor perubahan nama jalan yang terjadi di perkotaan. Penemuan faktor perubahan dikembangkan melalui proses elaborasi pengkodean hasil wawancara dan pola perubahan nama jalan.

1) Sosial Budaya

Melalui nama yang diberikan pada jalan dapat memberikan identitas pada suatu wilayah.

“Melalui perubahan nama jalan diharapkan dapat menjadi ‘museum peradaban’ tidak hanya pada skala lokal, tapi juga pada skala nasional.” (Informan 2, 2023)

Nama jalan memberikan gambaran kepada setiap generasi untuk mengenal sejarah bangsa dan teladan dari tokoh-tokoh yang pernah berjasa baik secara nasional maupun lokal. Figur tokoh-tokoh yang digunakan dapat menjadi teladan serta meningkatkan persatuan bangsa dan mempererat nilai persaudaraan antar penduduk Indonesia yang memiliki latar belakang sangat beragam. Nama jalan yang berupa tokoh menjadi pengingat atas nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh yang namanya ditetapkan sebagai nama jalan.

Selain itu, penamaan jalan merupakan bagian untuk mengakomodir masukan dan usulan dari masyarakat baik perorangan, kelompok masyarakat atau instansi. Usulan nama jalan dapat berasal dari perorangan, kelompok maupun organisasi dan instansi. Usulan dari warga setempat mencerminkan nilai-nilai atau identitas di lingkungannya. Melalui perubahan nama jalan dapat menjadi alat membangun hak warganegara karena dapat memberikan hak keistimewaan pada kelompok tertentu. Perubahan nama jalan dapat menjadi alat untuk mendorong inklusivitas sosial dan budaya melalui proses *bottom-up* yang menggabungkan pandangan atau perspektif lokal.



Gambar 6. Papan nama Jalan Margo Utomo di Kota Yogyakarta (Sumber: Survei Lapangan, 2023)



Gambar 7. Papan nama Jalan Guru Ma'mun di DKI Jakarta (Sumber: Survei Lapangan, 2023)

Nama jalan seringkali diberikan untuk menghormati tokoh budaya yang telah berjasa bagi masyarakat atau bangsa. Penggantian nama jalan menjadi salah satu cara untuk menghormati dan mengakui kontribusinya terhadap seni, sastra, dan bidang kebudayaan lainnya. Selain itu juga penghormatan kepada tokoh agama, pendidikan, kesehatan, atau keadilan menunjukkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat dan lingkungannya.

Simbol-simbol budaya dapat ditemukan pada penulisan nama jalan di papan nama jalan. Seperti di Kota Yogyakarta, papan nama jalan disertai dengan tulisan bahasa daerah yaitu huruf Jawa di bawah tulisan huruf latin. Hal ini menunjukkan simbol kebudayaan yang masih melekat dan menjadi identitas di Kota Yogyakarta (Gambar 6). Berbeda di DKI Jakarta, papan nama jalan hanya ditulis dengan huruf latin (Gambar 7). Perubahan nama jalan dengan simbol-simbol budaya, bahasa, nilai yang dianut suatu kelompok menunjukkan bahwa kelompok sosial masyarakat membangun, menuliskan ulang, menegaskan budaya lokal sesuai dengan identitas melalui teks ruang kota (Tan et al., 2022).

2) Politik

Era kolonialisme berdampak besar pada nama jalan di banyak wilayah bekas kolonial. Pada masa kolonial, otoritas kolonial sering kali memberi nama jalan yang mencerminkan identitas, sejarah, dan karakter negara asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa nama jalan menjadi strategi untuk menggabungkan identitas yang berbeda pada wilayah teritorial tertentu. Pola nama jalan tersebut dapat dilihat di DKI Jakarta maupun di Kota Yogyakarta, terutama di lingkungan yang dibangun dan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan maupun pemukiman kolonial pada masa penjajahan.

Namun setelah Indonesia merdeka, banyak sekali nama jalan yang diubah menjadi nama tokoh-tokoh revolusi. Nama jalan yang dikaitkan dengan penguasa kolonial dan simbol kolonial diubah untuk menghormati

pahlawan kemerdekaan dan tokoh nasional. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemulihan jati diri bangsa dan menghilangkan jejak zaman kolonial.

Perubahan nama jalan dilakukan oleh penguasa baru. Apabila pemerintahan atau rezim baru mengambil alih kekuasaan dan mengambil tindakan untuk merubah nama jalan yang sebelumnya terkait dengan figur atau simbol-simbol yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi atau naratif politik yang baru (Yeoh, 2018).

3) Penataan kota

Perubahan nama jalan berfungsi mengingat evolusi penataan suatu kota terhadap situasi politik dan sejarah pembentukan kota tersebut. Memorialisasi yang dibentuk pada zaman kolonialisme, pasca kemerdekaan hingga saat ini dikenali dari evolusi perubahan nama jalan yang ditemukan melalui teks kota.

Perubahan nama jalan juga diharapkan dapat memberi kemudahan dalam memfasilitasi navigasi oleh penduduk maupun wisatawan. Beberapa nama jalan digunakan untuk mempermudah orientasi. Seperti nama jalan Imogiri di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa jalan tersebut menuju ke Imogiri dan Jalan Bantul merupakan nama jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta ke Kabupaten Bantul.

Perubahan nama jalan juga sebagai bentuk urban restoratif dengan menghormati tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa penting dalam suatu ruang perkotaan. Seperti di DKI Jakarta dengan memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh Betawi sebagai

nama jalan dan di Kota Yogyakarta mengembalikan nama jalan yang terdapat pada sumbu filosofi ke nama-nama aslinya. Nama jalan digunakan untuk memperingati gerakan revolusioner. Peristiwa titik balik besar seperti kemerdekaan dari penjajahan kolonialisme memicu perubahan nama jalan (Yeoh, 2018). Analisis tersebut telah menunjukkan pencerminan yang erat dari perubahan mobilitas sosial budaya dan nama jalan.

Sebagaimana diungkapkan (Azaryahu, 1992) suatu rezim atau kepemimpinan menggunakan jalan untuk mendemonstrasikan kekuatan dan mentranskripsikan kekuatan secara spasial karena nama jalan mudah diubah, mudah diakses, dan sebagai penanda di ruang kota. Perubahan nama tersebut mengakibatkan nama jalan menjadi lebih bersifat peringatan, sebagai penguat ideologi atau identitas kota tersebut.

Perubahan nama jalan mengikuti kategori seperti menghilangkan nama kolonial, menerjemahkan nama ke dalam bahasa Indonesia, memberikan orientasi keruangan, kebutuhan menghormati pahlawan nasional, memproyeksikan identitas lokal, kebutuhan melindungi sejarah dan budaya wilayah. Proses perubahan nama jalan ini juga berhubungan dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi di kota sepanjang waktu.

Studi toponim dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara identitas dan kekuasaan. Dengan demikian, banyak yang dapat dipastikan tentang keyakinan politik dan ideologis yang memotivasi setiap rezim pendudukan dengan secara kritis memeriksa praktik penggantian

namanya. Teknik visualisasi GIS yang digunakan memfasilitasi pemetaan perubahan dalam dimensi spasialnya (Gambar 4) dan mengonfirmasi pengamatan sebelumnya (Rusu, 2021a). Jalan-jalan di pusat kota dan jalan raya besar mengalami penggantian nama lebih sering daripada jalan-jalan di daerah pinggiran (Mamvura et al., 2020). Kedua studi kasus tersebut menunjukkan berbagai motif, modus, dan materi yang terlibat dalam negosiasi ulang tatanan representasi budaya tergantung pada lokasi masing-masing, pengaturan sosiokultural, dan kekuatan sosial yang terlibat dalam suatu komunitas tertentu (Tan et al., 2022).

4. Penutup

Nama jalan digunakan sebagai peringatan menjadi metode kuat yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menggabungkan versi sejarah yang telah disetujui secara resmi ke dalam tata kota. Praktik penamaan jalan ini berperan sebagai tindakan verbal yang memungkinkan penggunaan kekuasaan atas ruang fisik, menulis teks kota untuk menetapkan, menulis ulang, atau menyesuaikan tatanan representasi budaya lokal menurut tujuan ideologisnya. Kedua studi kasus tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana rezim pascakolonial menangani kebutuhan akan representasi identitas kota melalui perubahan nama jalan. Meskipun pendekatan metodologis longitudinal memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan nama jalan dari waktu ke waktu, mungkin ada keterbatasan dalam data yang dapat membatasi pemahaman yang lebih

mendalam tentang perubahan ini. Selanjutnya, eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana proses perubahan nama jalan terkait dengan kebijakan pemerintah dan dinamika sosial dapat memberikan wawasan untuk mengungkap aktor, motif, pola penggantian nama, dan wacana masyarakat dalam pembentukan ruang perkotaan melalui nama jalan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada dalam perijinan dan penyediaan perangkat lunak. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan akses terhadap data. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada informan penelitian yang sudah bersedia diwawancarai. Penelitian ini tidak didanai oleh sumber pendanaan eksternal.

Daftar Pustaka

- Alderman, D. (2008). Place, Naming and the Interpretation of Cultural Landscapes. *The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, January*, 195–213. <https://doi.org/10.4324/9781315613031-11>.
- Anonim. (2017). *Nama Pahlawan Serbuan Kotabaru, Diabadikan Jadi Nama Penggal Jalan*. Portal Berita pemerintah Kota Yogyakarta. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/5732> diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
- Azaryahu, M. (1992). The Purge of Bismarck and Saladin: the Renaming of Streets in East Berlin and Haifa, a Comparative Study in Culture-Planning. *JSTOR*, 13(2), 351–367.
- Azaryahu, M. (1996). The Power of Commemorative Street Names. *Environment and Planning D: Society and Space*, 14(3), 311–330. <https://doi.org/10.1068/d140311>
- Bancilhon, M., Constantinides, M., Bogucka, E. P., Aiello, L. M., & Quercia, D. (2021). Streetonomics: Quantifying Culture using Street Names. *PLoS ONE*, 16(6 June 2021), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252869>.
- Buchstaller, I., Fabiszak, M., Alvanides, S., Brzezińska, A. W., & Dobkiewicz, P. (2023). Commemorative City-Texts: Spatio-Temporal Patterns in Street Names in Leipzig, East Germany and Poznań, Poland. *Language in Society*, 21(3). <https://doi.org/10.1017/S0047404523000040>.
- Catur Liskah Kartika. (2020). Penamaan Jalan di Kotamadya Surabaya: Kajian Toponimi. *BAPALA: Jurnal mahasiswa Unesa*, 7(4), 1–15.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dalgıç, E. N. & Yildirim, O. B. (2023). Changing the Identity of a Place by Changing Street Names: the Process of Renaming the Streets of Üsküdar Between 1927-1934. *A/Z ITU Journal of the Faculty of*

- Architecture*, 20(1), 181–197.
<https://doi.org/10.58278/0.2023.1>.
- Ditpop Indonesia. (1960). *Kota Djakarta*. Perusahaan Reproduksi dan Pertjetakan Ditpop.
<http://nla.gov.au/nla.obj-232869266> diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
- Drozdowski, D. (2014). Using History in the Streetscape to Affirm Geopolitics of Memory. *Political Geography*, 42, 66–78.
<https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2014.06.004>.
- Dutch East Indies. Officieel Toeristenbureau voor Nederlands-Indië. (1929). *Plan of Batavia*. Tourist Bureau.
<http://nla.gov.au/nla.obj-233358782> diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
- Erikha, F. (2021). Application of the Concept of Critical Toponymies to Street Name Changes in Bandung, Yogyakarta, and Surabaya. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11(1), 25.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v11i1.373>.
- Gill, G. (2005). Changing symbols: The renovation of Moscow place names. *Russian Review*, 64(3), 480–503.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9434.2005.00371.x>
- Goenawan, R. & Harnoko, D. (1993). *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial Di. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan* (Kedua). CV. Manggala Bhakti.
- Gunawan, R., Setiawan, A., Shaha, A., Abdurrahman, & Sunarti, L. (2010). *Toponim Jakarta dan Kepulauan Seribu* (Cetakan 1). Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Hestiyana, H. (2022). Toponimi dan Aspek Penamaan Asal-Usul Nama Jalan di Kabupaten Tanah Laut. *Sirok Bastra*, 10(2), 115–128.
<https://doi.org/10.37671/sb.v10i2.367>.
- Lynch, K. (1960). Kevin Lynch: The Image of the City 1. *The image of the city*, 1–14.
- Mamvura, Z., Pfukwa, C., & Mutasa, D. E. (2020). Scale, Street Renaming and The Continued Visibility of Colonial Street Names in Harare. *Nomina Africa*, 34(April 2018), 21–32.
- Massey, D. (2005). *For Space*. London: SAGE Publication Ltd.
- Prihadi, P. & Listiyorini, A. (2020). Latar Belakang Aspek Kehidupan pada Sistem Penamaan Jalan di Kota Yogyakarta: Kajian Antropolinguistik. *Litera*, 19(1), 109–123.
<https://doi.org/10.21831/ltr.v19i1.26617>.
- Rahmadian, M. F. (2022). *Perubahan Nama Jalan di Kota Yogyakarta (1958-2016)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ruchiat, R. (2018). *Asal Usul Nama Tempat di Jakarta* (Pertama). Masup Jakarta.
- Rusu, M. S. (2021a). Sequencing Toponymic Change: A Quantitative Longitudinal Analysis of Street Renaming in Sibiu, Romania. *PLoS ONE*, 16(5 May), 1–23.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251558>.
- Rusu, M. S. (2021b). Street Naming Practices: a Systematic Review of Urban Toponymic Scholarship.

- Onoma*, 56(10), 269–292.
<https://doi.org/10.34158/onoma.56/2021/14>.
- Simatupang, M. M., & Lubis, R. (2023). *Analisis Nama-Nama Jalan di Kota Pematang Siantar: Kajian Antropolinguistik*. 7, 29177–29194.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi* (Edisi ke-1). CV. Alfabeta, Bandung.
- Sutanta, H., Chintya, N. P. P., Atunggal, D., Diyono, D., Mustofa, M. F., & Siswosudarma, S. (2022). Tipologi Alamat di Perkotaan dan Perdesaan Indonesia dalam Proses Standardisasi Pengalamatan. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(1), 32.
<https://doi.org/10.22146/mgi.683>
- Suwarno & Salamun. (1990). *Mengenal Bangunan Bersejarah dan Nama-nama Jalan di Kotamadya Yogyakarta*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Yogyakarta.
- Tan, Peter K. W. & Purschke, C. (2022). *Street Name Changes as Language and Identity Inscription in The Cityscape. March*.
<https://doi.org/10.1515/lingvan-2020-0138>.
- Tent, J. (2015). Approaches to Research in Toponymy. *Names*, 63(2), 65–74.
<https://doi.org/10.1179/0027773814Z.000000000103>.
- Topografische Inrichting. (1925). *Jogjakarta en Omstreken*.
<http://nla.gov.au/nla.obj-649375951> diakses pada tanggal 30 Mei 2023.
- Yeoh, B. (2018). Colonial Urban Order, Cultural Politics, and the Naming of Streets in Nineteenth and Early Twentieth Century Singapore. Dalam *The Political Life of Urban Streetscapes: Naming, Politics, and Place*.